

k2 4-11-94

PELUANG DAN KENDALA

PASAR INTERNASIONAL

Suatu Tinjauan Terhadap Indonesia dan Australia

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
TANGGAL	5-12-94
SUMBER/HARGA	bel
KOLEKSI	KKI
NO. INVENTARIS	1643/kul/94-P.12
KETERANGAN	380.1 bel P10

Disusun dan Diterjemahkan Oleh:

Ors. Zulfahmi, Dipl. IT
Dosen Jurusan Pendidikan Dunia Usaha

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PADANG
1994

PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah yang Maha Esa atas tersusunnya buku ringkas ini.

Buku ini disusun berdasarkan tulisan dua pakar Indonesia dan Australia yang merupakan anggota Kelompok Kerja Forum Konsultasi Tingkat Menteri Australia-Indonesia (*Australia Indonesia Ministerial Forum*), yang dibentuk di Jakarta pada tanggal 12 Nopember 1992 lalu. Forum ini dimaksudkan sebagai wahana untuk memperluas kerjasama ekonomi dan bisnis antara kedua negara.

Melihat isi dan pendekatan yang digunakan dalam pembahasannya, buku ini akan sangat bermanfaat, baik bagi para pemerhati ekonomi maupun bagi para dosen dan mahasiswa yang mendalami studi ekonomi - terutama ekonomi internasional dan pemasaran internasional.

Buku ini hanya terdiri atas tiga bab. Dua bab pertama ditulis oleh pakar masing-masing negara, yang mencoba menganalisis dan menerangkan peluang dan kendala akses pasar di kedua negara. Bab 1 membahas tentang 'Akses Pasar dan Iklim Regulasi bagi Interaksi Masa Depan: Dari Perspektif Indonesia' ditulis oleh Moetaryanto. Sedangkan bab 2 tentang 'Akses Pasar Indonesia dan Iklim Regulasi bagi Perdagangan

dan Penanaman Modal di Masa Depan: Dari Perspektif Australia' ditulis oleh George Fane. Bab 3 berisi tentang beberapa kesimpulan umum yang dapat ditarik dari Bab 1 dan Bab 2. Kendati Indonesia dan Australia bertetangga dekat dan secara potensial memiliki peluang besar untuk membangun kerjasama ekonomi dan bisnis intensif yang saling menguntungkan, kenyataan hingga saat ini menunjukkan angka yang tidak begitu menggembirakan. Persealan inilah yang dihadapi diteliti dan diteliti untuk mengetahui penyebabnya yang mendasar untuk kemudian dicarikan solusi-solusi yang tepat.

Kiranya perlu disampaikan bahwa dalam menerjemahkan kedua makalah dimaksud penyusun tetap mempertahankan format penulisan sebagaimana yang digunakan oleh para penulisnya.

Pada kesempatan ini penyusun/penerjemah ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak Drs. H. Syahril, dosen senior ilmu pemasaran, dan bapak Drs. H. Nazir, dosen senior ekonomi internasional di jurusan Pendidikan Dunia Usaha FPIPS IKIP Padang, yang kerap penulis mintai penjelasan beliau tentang sejumlah konsep dan istilah dasar yang berkaitan dengan kedua bidang ilmu tersebut. Terima kasih juga kepada Any Thrisna dan Desmira yang telah menunjukkan komitmennya dalam membantu mengetikkan buku ini sehingga draft terjemahan yang pada mulanya berbentuk tulisan tangan yang centang perenang dapat terwujud dalam bentuknya yang

sekarang.

Akhirnya, penyusun sangat mengharapkan koreksi dan masukan dari para pembaca demi kesempurnaan terjemahan ini.

Padang, Maret 1994

Penyusun/Penerjemah

Zulfahni

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 AKSES PASAR DAN IKLIM REGULASI BAGI INTERAKSI MASA DEPAN: DARI PERSPEKTIF INDONESIA	
Oleh: Moetaryanto	
* PENDAHULUAN	1
* PERSPEKTIF GLOBAL	1
* PERDAGANGAN INDONESIA-AUSTRALIA DALAM PERSPEKTIF INDONESIA	4
* KENAPA VOLUME DAGANG BEGITU KECIL?	8
* PERDAGANGAN - MANFAATNYA	15
* KENDALA AKSES PASAR - MENURUT PANDANGAN INDONESIA	17
* MENINGKATKAN AKSES KE PASAR AUSTRALIA	21
* KESIMPULAN	23
* REFERENSI	24
BAB 2 AKSES PASAR INDONESIA DAN IKLIM REGULASI BAGI PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL DI MASA DEPAN: DARI PERSPEKTIF AUSTRALIA	
Oleh: George Fane	
* PENDAHULUAN	26
* Tinjauan Umum	26
* Keterbukaan Ekonomi Indonesia Sejak 1985	27
* Pertumbuhan Perdagangan dan Investasi	

Australia di Indonesia	29
* PERATURAN-PERATURAN IMPOR	32
* Penghapusan Hambatan Non-Tarif Sejak 1986	32
* Kerangka Dasar Peraturan Impor	33
* Daftar Barang-barang Terlarang	35
* Daftar Terbatas	35
* PAJAK IMPOR, PENGEMBALIAN DAN PENGHAPUSAN	
BEA MASUK	37
* Tarif dan Bea Masuk Tambahan	37
* Peraturan Izin Sementara	39
* Mekanisme Anti-Dumping	41
* PENANAMAN MODAL	43
* Izin Penanaman Modal	43
* Pajak PMA dan PMDN	50
* Hak Milik Intelektual	51
* MASALAH DALAM BERBISNIS DENGAN INDONESIA:	
MENURUT PERSPEKTIF AUSTRALIA	53
* Survei AIBCC 1986	53
* Perkembangan Hubungan Ekonomi	
Australia-Indonesia Sejak 1986	56
* PROSPEK AKSES PASAR DI MASA MENDATANG	57
* REFERENSI	59
* LAMPIRAN	60
BAB 3: KESIMPULAN UMUM	61

**AKSES PASAR DAN IKLIM REGULASI
BAGI INTERAKSI MASA DEPAN:
DARI PERSPEKTIF INDONESIA**

Moetaryanto

PENDAHULUAN

Prinsip dasar ilmu ekonomi internasional ialah mencapai keuntungan perdagangan. Melalui perdagangan, negara-negara yang mempunyai teknologi dan biaya produksi yang lebih unggul dapat, misalnya, menjadi lebih kaya. Hal ini disadari oleh Indonesia dan Australia, namun demikian perdagangan antara kedua negara relatif masih belum berarti. Banyak yang menyebabkannya. Di antaranya berkaitan dengan politik ekonomi dalam kebijaksanaan perdagangan yang mengarah kepada berbagai tindakan proteksi seperti pengenaan tarif, mekanisme anti-dumping dan bea masuk kompensasi. Aspek-aspek fisik dan psikologis pasar itu sendiri pun membatasi hubungan dagang kedua negara.

PERSPEKTIF GLOBAL

Kaitan erat antara perdagangan dan rejim nilai tukar valuta bebas dan kemakmuran telah menjadi fokus perhatian, khususnya selama beberapa dasawarsa terakhir. Negara-negara

yang menganut kebijaksanaan perdagangan yang berorientasi ekspor lebih baik kinerjanya dibanding negara-negara yang berorientasi pasar domestik. Selama periode 1972-84, ekonomi negara-negara yang sangat berorientasi ekspor mencatat pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 7,8 perser per tahun. Dalam periode yang sama, ekonomi negara-negara yang sangat berorientasi pasar domestik hanya mampu mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata 2,4 persen per tahun.¹

Maka hipotesis yang mengatakan bahwa rejim perdagangan bebas membawa kepada perluasan perdagangan kini didukung oleh sejumlah bukti empiris. Meskipun demikian, ada dua kendala utama dalam memperluas perdagangan ini.

Pertama, tertunda-tundanya kesepakatan tentang Putaran GATT menperlambat proses penghapusan menyeluruh hambatan tarif dan non-tarif dalam perdagangan. Proteksi terhadap sektor-sektor yang dulunya dikecualikan seperti pertanian, tekstil, jasa dan hak milik intelektual ternyata menjadi masalah tajam yang tidak mudah diselesaikan. Ini mengurangi nilai keberhasilan perundingan GATT sebelumnya yang telah dapat meningkatkan secara berarti perdagangan produk-produk manufaktur, dan membawa kepada peningkatan kemakmuran di banyak negara.

¹ IMF mendefinisikan negara yang sangat berorientasi ekspor adalah yang kontrol perdagangannya sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Sedang negara yang sangat berorientasi pasar domestik adalah yang kebijaksanaan dan tujuannya diarahkan untuk meningkatkan produksi untuk pasar dalam negeri.

Kedua, negara-negara industri, yang merupakan pasar yang besar bagi perdagangan dunia dan seyogyanya merupakan pihak yang paling beruntung dalam sistem perdagangan bebas, semakin getol memasang hambatan tarif dan non-tarif, dan memberlakukan bea masuk kompensasi dan kebijaksanaan anti dumping. Contohnya, negara-negara OECD sekarang meningkatkan subsidi bagi produsen pertanian rata-rata sebesar 45 persen dari nilai produksi sektor pertaniannya (Selandia Baru dan Australia merupakan yang terendah yakni 4 persen dan 15 persen).² Selain itu, perdagangan tekstil tetap merupakan benang kusut dalam perjanjian-perjanjian kuota bilateral yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip GATT. Dalam suatu kemajuan bersejarah yang berhasil dicapai, tekstil dan pertanian kini juga dicakup dalam Putaran Uruguay kendati proteksi yang rendah akan diberlakukan secara bertahap. Contoh lain hambatan non-tarif dapat kita lihat pada undang-undang imigrasi yang sifatnya menghambat perdagangan jasa melalui pembatasan mobilitas para penyedia jasa.

Peranan negara-negara maju sebagai pasar ekspor negara-negara berkembang semakin berkurang. Menghadapi kondisi seperti ini, para eksportir negara-negara berkembang kini mencari pasar-pasar baru, terutama pasar sesama negara berkembang. Negara-negara maju, di tahun 1980, menyerap 80 persen ekspor total dunia, sementara di tahun 1990 angka ini

² Sebaliknya, sejumlah kajian menunjukkan tingkat proteksi yang rendah (kurang dari 3 persen) bagi negara-negara berkembang yang besar (Argentina, Brazil, Cina, India dan Meksiko).

menyusut menjadi 67 persen.

Keberhasilan persetujuan Putaran Uruguay memberi harapan lebih besar bagi perdagangan dunia. Situasi perdagangan global kini telah melewati tahap kritis, namun tak diragukan lagi masih banyak rintangan yang dihadapi. Bila kita tidak ingin kemajuan-kemajuan yang telah tercapai sejak berakhirnya Perang Dunia II tetap terancam, peluang keuntungan yang ada pada Putaran Uruguay perlu dimanfaatkan terus menerus.

PERDAGANGAN INDONESIA-AUSTRALIA: DALAM PERSPEKTIF INDONESIA

Nilai perdagangan - yaitu nilai ekspor ditambah impor - antara Indonesia dan Australia selama periode 1981-80 meningkat rata-rata 11 persen per tahun menurut nilai dolar AS. Meskipun demikian, dari kecenderungan peningkatan yang bersifat jangka panjang ini ada beberapa hal yang tidak tampak. Pertama, sejumlah fluktuasi penting dalam perdagangan kedua negara tidak terungkap. Setelah nilai perdagangan meningkat sebesar 27 persen pada tahun 1982, yang relatif sama dengan yang terjadi pada tahun 1981, pada tahun 1983 anjlok hampir sebesar 41 persen. Tambahan lagi, baru pada tahun 1988 rekor nilai perdagangan tahun 1981 tersebut dapat terpecahkan. Selain itu, sementara impor Indonesia terhadap barang-barang Australia relatif mantap, ekspor Indonesia ke Australia justru mengalami pasang dan

surut. Contoh yang ekstrem adalah terjadinya lonjakan ekspor Indonesia sebesar 95 persen setelah tahun 1986 (kendati sebagian di antaranya mungkin disebabkan oleh adanya devaluasi nilai rupiah pada masa itu.)

Suatu kajian tentang impor Australia memperlihatkan pentingnya Indonesia sebagai sumber impor dibandingkan dengan Singapura dan ASEAN secara keseluruhan. (lihat Tabel 1).

Tabel 1

Impor Australia dan Negara Asal Menurut SITC, 1992

SITC	Keterangan	Nilai total (Juta \$ AS)	Indonesia (Persen)	Singapura (Persen)	ASEAN (Persen)
-	Seena barang	40.814,19	2,24	2,39	8,09
0	Makanan dan Hewan Hidup	1.576,72	2,49	2,68	18,03
1	Minuman dan Tembakau	304,25	0,19	0,33	2,90
2	Bahan Mentah, Non-Pangan Selain Minyak Bumi	1.047,44	3,81	0,65	16,93
3	Minyak Bumi, Pelumas dan Bahan-bahan Terkait	2.385,06	20,35	8,76	38,97
4	Minyak Hewan dan Tumbuh- an, Lemak dan Lilin	128,00	8,30	5,62	40,91
5	Bahan Kimia dan Produk Terkait	4.574,94	0,25	1,96	3,54
6	Barang Hasil Industri	6.258,74	2,18	0,90	6,94
7	Mesin dan Peralatan Transportasi	17.452,36	0,62	2,31	4,39
8	Barang Hasil Industri Lain	6.259,74	1,26	1,98	6,59
9	Transaksi Komoditas dan produk selain 0-8	881,82	0,65	4,05	8,95

Sumber:

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 1992 nilai impor Australia adalah AS\$ 40.814 juta. Negara-negara ASEAN memasok 8,09 persen dari impor Australia, sementara andil

MILIK UPT PERPUSTAKAAN

IKIP PADANG

Indonesia hanya sebesar 2,24 persen. Penting dicatat bahwa impor Australia dari Singapura sebesar 2,39 persen dari total impornya; lebih besar dari impor Australia dari Indonesia.

Pada tahun 1992, impor partai besar Australia meliputi barang-barang manufaktur, permesinan dan peralatan transportasi (SITC 6, 7, 8) - mata dagangan yang secara tradisional bukan andalan ekspor Indonesia. Namun demikian, Indonesia kini sedang dalam proses peralihan ke pembuatan barang-barang hasil industri. Akhir-akhir ini Indonesia memasok hanya 2 persen lebih terhadap impor Australia. Ekspor komoditas manufaktur industri Indonesia meningkat, dan Indonesia secara pelan-pelan sedang menuju ke arah pembuatan barang-barang hasil industri yang sesuai dengan keinginan pasar Australia.

Impor terbesar Australia dari Indonesia (AS\$485 juta) adalah dalam kategori Minyak Bumi, Pelumas dan Bahan-bahan Terkait. Sebagai negara yang kaya minyak, Indonesia memang memiliki keunggulan komparatif dalam sektor ini.

Tabel 2 menunjukkan bahwa 62 persen ekspor Australia terdiri dari produk-produk pertanian (SITC 0 dan 1) dan produk-produk yang secara longgar dapat dikategorikan sebagai produk pertambangan (SITC 2.3).³ Dengan mengimpor hanya 2,96 persen dari nilai total ekspor Australia Indonesia

SITC 0 dan 1

merupakan pasar ekspor yang relatif kecil bagi Australia.⁴ Indonesia memang belum merupakan pasar ekspor utama Australia untuk kategori manapun.

Tabel 2

Ekspor Australia dan Negara Tujuan Menurut SITC, 1992

SITC	Keterangan	Nilai total (Juta \$ AS)	Indonesia (Persen)	Singapura (Persen)	ASEAN (Persen)
-	Semua barang	42.976,12	2,96	6,54	14,21
0	Makanan dan Hewan Hidup	7.776,80	0,92	2,54	8,53
1	Minuman dan Tembakau	277,65	0,65	1,66	3,18
2	Bahan Mentah, Non-Pangan Selain Minyak Bumi	9.926,14	2,00	0,11	4,05
3	Minyak Bumi, Pelumas dan Bahan-bahan Terkait	8.567,51	2,88	1,39	9,44
4	Minyak Hewan dan Tumbuh- an, Lemak dan Lilin	117,56	0,70	1,37	6,11
5	Bahan Kimia dan Produk Terkait	1.334,15	3,75	5,39	19,14
6	Barang Hasil Industri	5.232,54	6,07	3,70	19,84
7	Mesin dan Peralatan Transportasi	4.221,36	3,2	6,27	14,5
8	Barang Hasil Industri Lain	1.734,56	1,28	4,41	15,25
9	Transaksi Komoditas dan produk selain 0-8	4.232,35	5,44	27,94	51,56

Sumber:

Untuk produk-produk curah, karena tingginya biaya pengapalan, ekspor Indonesia ke Australia lebih rendah dibanding ekspor negara-negara lain yang letaknya jauh dari Australia. Pada tahun 1990 kayu gergajian yang diimpor Australia dari Indonesia hanya sebesar 4 persen dari keseluruhan impor kayunya. Bandingkan dengan Amerika Serikat, Malaysia dan Kanada yang masing-masingnya

⁴ Menurut Kementerian Perdagangan, ASEAN dan Jepang adalah dua pasar ekspor utama Indonesia.

mengekspor sebesar 20 persen lebih. Untuk minyak mentah, Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia memasok masing-masing 29 persen dan 21 persen dari impor total minyak mentah Australia, sementara Indonesia hanya mengekspor 16,3 persen. Untuk produk minyak kilangan, Singapura memasok 27 persen, sementara Indonesia hanya 3 persen. Untuk kategori 'benang tenun dan kain katun,' nilai impor Australia dari Indonesia jauh di bawah angka yang dicapai Taiwan, Amerika Serikat, Korea Selatan, Hongkong, Pakistan dan Cina. Demikian juga untuk 'Sepatu', Cina, Korea Selatan dan Taiwan mendominasi impor Australia tahun 1990 dibandingkan dengan Indonesia yang persentasenya dapat diabaikan.

KENAPA VOLUME DAGANG BEGITU KECIL?

Data tentang kajian perdagangan Indonesia tidak menemukan harapan yang kuat bagi hubungan dagang antara Australia dan Indonesia, walaupun kedua negara memiliki faktor-faktor seperti, jarak yang berdekatan; tahap perkembangan ekonomi kedua negara (yang satu negara industri dan yang lain negara berkembang); dan pengetahuan teknologis yang dimiliki. Kendati saat ini Indonesia termasuk sepuluh besar mitra dagang Australia dan hubungan keduanya semakin erat, Australia bukanlah pasar utama ekspor Indonesia, demikian pula sebaliknya.

Alasan yang mungkin mengenai keadaan ini adalah menyangkut harga c.i.f atas produk ekspor Indonesia. PERPUSTAKAAN
MENCANA, MASHITON

IKIP PADANG

kedua negara berdekatan, ongkos kapal dari Indonesia ke Australia lebih tinggi ketimbang dari negara-negara lain. Kedua, harga f.o.b produk ekspor Indonesia tinggi. Alasan-alasan ini mungkin benar untuk beberapa jenis barang yang diperdagangkan antara kedua negara, akan tetapi belum tentu dapat dipakai sebagai alasan umum kenapa nilai perdagangan Indonesia-Australia rendah.

Transaksi dagang antara Indonesia dan Australia relatif rendah. Kecuali untuk produk-produk perminyakan, komoditas-komoditas yang diinginkan Australia belum menjadi andalan Indonesia. Oleh karena itu, produk ekspor tradisional Indonesia belum pula mendapat pasar yang kuat di Australia. Karena ekonomi kedua negara sama-sama memiliki basis pertanian yang luas, seyogyanya ada peluang pasar yang mantap. Demikian juga untuk kebanyakan komoditas primer yang melimpah baik di Indonesia maupun Australia, kecil kemungkinan terjadi perdagangan antara kedua negara. Selain itu, meskipun perekonomian Indonesia sedang dalam peralihan ke arah industrialisasi, dan oleh karenanya membutuhkan lebih banyak mesin-mesin dan infrastruktur komunikasi, sektor-sektor ini pun masih belum menjadi andalan Australia sampai sekarang. Keadaan ini terlihat jelas pada Tabel 2.

Namun demikian, ada kemungkinan data resmi di muka tidak menggambarkan perkembangan perdagangan antara Indonesia dan Australia yang sebenarnya. Ada insentif bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dan Australia agar memanfaatkan

perusahaan-perusahaan di Singapura sebagai agen eksportnya. Perusahaan-perusahaan Indonesia mengekspor sejumlah produknya kepada perusahaan-perusahaan di Singapura yang selanjutnya mengekspornya lagi (mungkin setelah dikemas ulang atau diproses lebih lanjut) ke Australia. Inilah alasannya kenapa untuk produk non-pertanian Singapura menasok 7,19 persen impor 'Hewan dan Minyak Sayur' Australia.

Bagi perusahaan-perusahaan Indonesia mengumpulkan informasi tentang peluang bisnis di Australia lebih mahal ketimbang peluang di Singapura. Sebab, Singapura lebih dekat sehingga memungkinkan untuk berinteraksi dan berhubungan secara lebih intensif. Kultur bisnis Indonesia dan Singapura pun lebih mirip ketimbang Indonesia dan Australia. Pada Bab 3 di coba mengkaji kemungkinan mitra segitiga antara kepentingan Indonesia, Singapura dan Australia sebagai jalan pemecahan yang efisien terhadap kendala-kendala pelaksanaan bisnis ini.

Alasan lain yang menyebabkan rendahnya tingkat perdagangan Indonesia-Australia ini terletak pada hambatan-hambatan perdagangan di kedua negara. Sistem tarif yang diberlakukan Australia dirancang terutama untuk membedakan barang yang datang dari negara-negara berkembang (yang dikenakan tarif preferensial) dengan barang-barang dari negara-negara lain (yang dikenakan tarif umum). Lagi pula, pemerintah Australia saat ini telah mengurangi tarif secara beruntun sehingga

tidak lebih dari 15 persen. Untuk produk-produk penting seperti tekstil, benang tenun dan sepatu, para pesaing Indonesia menghadapi upah buruh yang makin meningkat dan tingkat tarif yang makin tinggi. Negara-negara yang sebelumnya dikategorikan sebagai Negara Industri Baru (NIC), yang sekarang sudah dikategorikan sebagai negara maju, kini menghadapi tingkat tarif yang lebih tinggi untuk produk eksportnya. Ini merupakan kabar gembira bagi eksportir Indonesia yang mendambakan akses ke pasar Australia. Namun, kabar ini menjadi kurang menggembarakan dengan adanya fakta bahwa, kendati eksportir tekstil, benang dan sepatu Indonesia berpeluang mendapatkan keuntungan dari pemberlakuan tarif relatif, tarif absolut untuk sektor ini masih sangat tinggi - kerap lebih dari 35 persen. Mujurnya, ada pemotongan tarif sebesar 50 persen untuk produk yang digolongkan sebagai 'produk industri kerajinan' - yaitu yang dibuat dengan mesin yang digerakkan dengan tangan atau kaki. Sebagian besar industri rumah tangga memang menggunakan mesin-mesin yang sangat sederhana, sehingga termasuk ke dalam kategori ini.

Penyebab lain rendahnya perdagangan antara Indonesia dan Australia ini dapat dilihat dari luas pasar Australia. Pada bulan Juli 1991, penduduk Australia tercatat sebanyak 17 juta jiwa lebih sedikit. Ini relatif kecil. Sebagai perbandingan, penduduk ASEAN (tidak termasuk Indonesia) pada tahun 1991 sebanyak 140 juta - merupakan pasar yang penting bagi eksportir Indonesia. Di samping

MILUK DAN PERPUSAKAAN

IKIP PADANG

peluang-peluang pasar lain yang dekat di Vietnam, Kamboja dan Laos.

Sebaran penduduk Australia juga membawa sejumlah masalah. Sebagian besar penduduk Australia menempati kawasan pesisir negeri ini, yang terpadat di antaranya adalah negara bagian New South Wales dan Victoria. Selain kota Sydney dan Melbourne, kota-kota di Australia hanya berpenduduk di bawah 3 juta jiwa. Pasar-pasar ekspor sangat terkonsentrasi di pantai timur Australia dan di enam ibukota negara bagian (Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth dan Hobart). Kota-kota ini malah ada yang berjarak ribuan kilometer, yang berarti biaya angkut dan biaya distribusi menjadi tinggi. Salah satu pemecahannya mungkin dengan cara mengapalkan langsung ke kota-kota bersangkutan. Akan tetapi, mengingat jumlah penduduk kotanya maka jumlah barang yang dikapalkan untuk setiap pengiriman ke salah satu kota bersangkutan akan terbatas, akibatnya biaya kirim per unit menjadi lebih tinggi. Tambahan lagi, bila jumlah barang yang dikirim sedikit, harga f.o.b yang dibebankan lebih tinggi.

Jumlah penduduk dan jauhnya jarak masing-masing kota merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara mendalam oleh kalangan bisnis Indonesia yang berupaya memasuki pasar Australia. Gagal menjual mata dagangan di suatu kota berarti harus membawanya ke kota lain, dengan biaya transportasi yang tinggi. Akibatnya, harga jual yang tinggi tak dapat dihindari meskipun semua pesaing, yang

tidak memiliki jaringan distribusi yang mantap di Australia, sana-sana menghadapi masalah biaya ini.

Dengan ukuran dan karakteristik pasar Australia yang demikian, sulit menghindari kesan bahwa pasar ini mapan, dan tidak mudah untuk dimasuki. Bagi sebagian usahawan hal ini mungkin merupakan tantangan namun mereka yang bermodal terbatas akan segera balik kanan bila menghadapi ketidakpastian seperti itu. Kemungkinan cara yang paling aman untuk memasuki pasar Australia adalah dengan menggunakan bantuan perwakilan dagang setempat yang baik. Disarankan agar penyebaran produk ke seluruh negeri ditangani oleh distributor penghubung yang berkantor pusat di Sydney atau Melbourne, mengingat distributor dari kedua kota inilah yang paling mungkin memiliki cabang-cabang di seluruh Australia. Akan tetapi, gagasan ini bisa jadi sangat sulit bagi industri rumah tangga kecil Indonesia yang berminat memasuki pasar Australia.

Kendala informasi diduga ikut menyebabkan kurang gencarnya serbuan yang dilakukan eksportir Indonesia, karena mereka kesulitan dalam mencermati potensi pasar Australia. Dari perspektif bisnis, kekurangan informasi-informasi penting berarti berhadapan dengan ketidakpastian, ditambah lagi dengan kondisi pasar Australia yang kecil dan mapan. Untuk menekan resiko serendah mungkin, informasi adalah perlu.

Indonesia mungkin menghadapi pula persaingan tajam dari

eksportir negara lain, khususnya dari negara-negara Pasifik dan Selandia Baru yang menikmati tarif yang lebih baik ketimbang yang didapati Indonesia.⁵ Misalnya untuk bidang tekstil. Di bidang lain, produk-produk kayu juga menghadapi hambatan dalam bentuk pelarangan yang memungkinkan, yang disebabkan oleh meningkatnya keprihatinan terhadap masalah-masalah lingkungan di Australia, terutama menyangkut kelanggengan hutan tropis.

Petunjuk lain mengenai rendahnya tingkat ekspor Indonesia ke Australia adalah tingkah laku ekspor itu sendiri yang tidak menentu. Fluktuasi mata uang bukanlah penyebab utama. Kendati masih berupa dugaan kasar dan perlu didukung data, fluktuasi ekspor Indonesia ke Australia diduga disebabkan oleh kurangnya pesanan yang berkelanjutan. Di antaranya dapat dilihat dari pesanan-pesanan terhadap busana (pakaian) mode. Begitu suatu mode tertentu berakhir, sangat kecil kemungkinan adanya pemesanan ulang. Alasan lain barangkali menyangkut kekecewaan importir terhadap mutu barang yang mereka terima. Seperti dijelaskan sebelumnya, sudah barang tentu importir tidak akan berhasil memasarkan barang seperti itu dan akhirnya disimpan menjadi persediaan untuk tahun depan, sehingga pesanan ulang tertunda sambil menunggu keadaan yang lebih menguntungkan.

⁵ Perlakuan tarif yang lebih baik ini dilaksanakan melalui Persebutuan Hubungan Perdagangan yang telah diadakan antara Australia dan Selandia Baru dan SPACITCA, dan hubungan Perdagangan dengan Indonesia Regional 1970-1971 Selandia.

Politik juga mempengaruhi perdagangan. Seruan serikat buruh pada tahun 1991 yang melarang pembongkaran kapal-kapal yang membawa produk-produk Indonesia ke Australia, misalnya. Contoh lain, seruan boikot terhadap produk-produk Indonesia yang disuarakan oleh kelompok-kelompok pecinta lingkungan. Ketidakpastian seperti ini berpengaruh terhadap perdagangan.

PERDAGANGAN - MANFAATNYA

Orang sepakat bahwa perdagangan membawa peningkatan kemakmuran bilateral. Teori perdagangan internasional menyiratkan ada dua macam keuntungan perdagangan, keuntungan 'statis' dan 'dinamis'.

Keuntungan 'statis' meliputi penciptaan perdagangan dan pengalihan perdagangan. Bila perubahan dalam hambatan perdagangan sampai mengakibatkan kedua negara meningkatkan impor masing-masing dari barang-barang tertentu dari mitra-mitra yang biaya produksinya rendah, berarti terjadi efek penciptaan perdagangan. Penciptaan perdagangan meningkatkan kemakmuran - yang merupakan hasil dari pemanfaatan keunggulan komparatif di masing-masing negara.

Sebaliknya, bila perubahan dalam hambatan perdagangan sampai mengakibatkan kedua negara mengganti impor produk-produk murah dengan produk-produk dalam negeri yang mahal, berarti terjadi efek pengalihan perdagangan, yang berakibat turunnya kemakmuran karena kedua negara gagal memanfaatkan sepenuhnya

keunggulan komparatif masing-masing.

Keuntungan 'dinamis' perdagangan tercipta dari pemanfaatan skala ekonomi yang lebih baik, keteramalan pasar yang makin meningkat, penyebaran teknologi yang lebih mudah, pasar potensial yang besar, dan iklim yang lebih stabil bagi penanaman modal asing langsung. Kerangka statis-dinamis ini dapat dipakai untuk menilai perdagangan Indonesia-Australia dan untuk mengkaji bidang-bidang yang mungkin dapat ditingkatkan.

Hubungan ekonomi juga dapat memperkuat hubungan politik. Selain dapat dicapai melalui cara-cara yang spesifik (misalnya dengan perjanjian keamanan), persetujuan dagang bilateral merupakan sarana yang dapat mempererat hubungan kedua negara. Perdagangan bilateral yang kuat dapat dipandang sebagai 'upaya membangun rasa saling percaya' demi perdamaian.

Rendahnya tingkat perdagangan intra-regional dapat dituding sebagai salah satu penyebab kenandegan kerjasama serantau. Masa-masa melambatnya laju ekonomi yang akhir-akhir ini dihadapi negara-negara yang tergolong sangat maju dan krisis keuangan yang dialami negara-negara tertentu di Eropa, merupakan contoh krisis dalam negeri yang mengakibatkan negara-negara lebih menekankan kepentingan nasional jangka pendek dan terkesan mengabaikan manfaat jangka panjang kerjasama ekonomi bilateral.



KENDALA AKSES PASAR - MENURUT PANDANGAN INDONESIA

Meskipun pada umumnya agregat ekonomi Australia secara makro cukup bagus, banyak tuduhan bahwa jumlah biaya dumping meningkat selama tahun-tahun di mana kinerja makroekonomi relatif jelek. Pertumbuhan PDB Australia sedang mengalami resesi, namun untuk tahun 1993-94 diperkirakan naik mencapai 2,6 persen kendati tingkat pengangguran saat ini sangat tinggi, yakni sekitar 11 persen. Selain itu, pada tahun lalu pertumbuhan penjualan eceran dalam negerinya meningkat hanya sebesar 0,9 persen. Semua ini menyiratkan adanya potensi pengurangan kesempatan bagi para eksportir Indonesia. Defisit neraca berjalan Australia yang besar dan berkepanjangan juga merupakan sumber potensial yang akan menekan Australia agar lebih menegakkan lagi hambatan-hambatan impor, terutama berupa kebijaksanaan non-tarif seperti peraturan yang lebih ketat mengenai standar produk dan pematuhannya; peraturan karantina yang lebih ketat; standar pengemasan yang lebih tinggi; dan pengenaan biaya dumping terhadap produk-produk Indonesia. 'Penyesuaian internal' seperti ini hanya akan menurunkan perdagangan kedua negara, yang memang sudah sangat kecil.

Sementara hambatan perdagangan berupa tarif dan kuota dikurangi, di seluruh dunia saat ini terjadi kecenderungan untuk menggantinya dengan bentuk lain berupa hambatan-hambatan non-tarif. Pada tahun 1989 sistem izin impor dihapuskan di Australia, akan tetapi ketentuan anti-dumping

MILIK UPT PERPUSTAKAAN

IKIP PADANG

tetap dipertahankan kendati telah disederhanakan pada tahun 1988. Pula, peraturan karantina atas hewan hidup dan produk pertanian sering dirasakan oleh eksportir Indonesia sebagai hambatan perdagangan dalam bentuk lain.

Perlu ditekankan bahwa biaya dumping yang dikenakan atas impor dari Indonesia kelihatannya lebih didorong oleh kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, ketimbang oleh kecurigaan sungguhan bahwa barang-barang Indonesia dijual secara dumping.

Misal, akhir-akhir ini mencuat tuduhan praktik dumping terhadap sejumlah perusahaan aki dan produk kertas Indonesia. Tuduhan-tuduhan ini membawa sejumlah akibat. Seandainya tuduhan itu diterima oleh Dinas Pabean dan Badan Anti-Dumping Australia lalu importirnya ditagih sejumlah bea masuk, maka tak pelak lagi harga jual barang akan meningkat. Secara tidak langsung, importir Australia yang mengetahui bahwa pemasok Indonesianya tengah diselidiki atas kasus dumping, selama penyelidikan masih berjalan akan enggan menanamkan pesanan. Selanjutnya terjadi pula pertambahan biaya, karena proses hukumnya sangat mahal.

Mengenai standardisasi ketentuan anti-dumping, kepada para eksportir Indonesia perlu diberikan lebih banyak informasi teknis melalui pendidikan, brosur-brosur, dan seminar-seminar. Meskipun tidak menjamin turunnya jumlah biaya dumping, pendidikan akan meningkatkan kesadaran para

eksportir Indonesia tentang permasalahan dan konsekuensinya. Pendidikan juga akan dapat mengurangi beban biaya yang disebabkan oleh masalah-masalah teknis yang terjadi karena ketidaktahuan pihak eksportir Indonesia.

Kendala yang lebih spesifik dalam perdagangan dengan Australia adalah keberlakuan standar Australia. Konsumen Australia yang amat peduli terhadap harga dan mutu ditambah dengan pasar yang relatif kecil menyulitkan Indonesia untuk meningkatkan perdagangan bilateral dengan Australia. Akan lebih sulit lagi bila standarnya berbeda dari yang berlaku secara internasional. Asosiasi Standar Australia merekomendasikan standar tertentu terhadap bahan-bahan dan produk-produk yang dijual di Australia. Dalam rangka promosi penjualan, pemenuhan standar ini merupakan faktor penting. Undang-undang pengemasan yang mengharuskan produk-produk tertentu dikemas dalam ukuran-ukuran yang telah ditetapkan dapat pula menjadi masalah apabila, seperti yang kadang-kadang terjadi, syarat-syarat pengemasannya berbeda dari yang diberlakukan mitra-mitra dagang Indonesia di negara lain. Syarat-syarat pengemasan berbeda-beda pula di setiap negara bagian dan hal ini juga akan sangat mempengaruhi biaya produksi.

Negara-negara mitra dagang mungkin menghubungkan kinerja ekspor dengan upah tenaga kerja yang relatif rendah. Ini dapat menimbulkan biaya dumping makin tinggi, dan kemungkinan penbebanan bea masuk. Dalam kaitan ini, ada

baiknya dibanding-bandingkan produktivitas tenaga kerja antar negara. Dengan menggunakan metodologi Perbandingan Keluaran dan Produktivitas (ICOP), riset menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia, bila dinilai berdasarkan Paritas Daya Beli (PPP), sama dengan 10 persen tingkat produktivitas tenaga kerja Amerika Serikat. Berdasarkan perhitungan paritas ini, ditemukan bahwa upah harian rata-rata pekerja Indonesia seharusnya Rp. 1100 per jam atau Rp. 7500 per hari.⁶ Dengan upah yang berlaku sebesar Rp. 2500-3000 per hari berarti bayaran pekerja Indonesia lebih rendah rata-rata Rp. 5000. Akan tetapi, metodologi PPP memiliki kelemahan, terutama karena tidak memperhitungkan permintaan terhadap tenaga kerja. Upah berlaku yang rata-rata Rp. 2500-3000 berkemungkinan sudah mendekati tingkat upah ekuilibrium pasar tenaga kerja, sehingga bila terjadi kenaikan yang berarti maka angka pengangguran di Indonesia akan meningkat.

Jadi, paksaan untuk menaikkan tingkat upah melebihi daya dukung ekonomi dapat dipandang sebagai usaha untuk mengurangi keunggulan komparatif Indonesia. Dengan kata lain, upaya seperti ini sering dilakukan negara-negara maju untuk mengurangi tingkat persaingan dari negara-negara berkembang yang dihadapi para produsennya.

Perdagangan bilateral antara Indonesia dan Australia kurang didukung oleh infrastruktur keuangan yang memadai untuk

⁶ Lihat *Selma*, 1993. Diperlukan acuan yang tepat.

memudahkan perdagangan. Misal, mekanisme penyelesaian pembayaran antara kedua negara sangat kurang dikembangkan. Masalah lain ialah kurangnya mekanisme pembagian beban dalam rangka menutupi kerugian yang timbul akibat berubahnya kebijaksanaan. Di pihak Indonesia, ketidakefisienan penanganan di pelabuhan dan birokrasi yang berlebihan juga merupakan penghambat perdagangan.

MENINGKATKAN AKSES KE PASAR AUSTRALIA

Salah satu pilihan yang sering disarankan untuk ini ialah kemungkinan mengadakan persetujuan dagang preferensial antara Australia dan negara-negara tetangganya. Namun, harus diakui bahwa ekonomi Australia, kendati hampir sama besar dengan ekonomi negara-negara ASEAN secara keseluruhan, masih tergolong sebagai kekuatan ekonomi menengah yang pengaruh ekonominya kecil dalam negosiasi-negosiasi dagang bilateral ataupun multilateral. Satu hal yang dapat mengurangi kemanfaatan sistem persetujuan dagang preferensial dua negara ini adalah bahwa Australia cuma memiliki daya tarik marginal, yang disebabkan oleh potensi pasarnya kecil dan program penurunan tarif sepihak yang dijalankannya, yang akan makin mengurangi keuntungan preferens yang sedianya dapat dinikmati para mitra dagang yang ikut dalam persetujuan preferensial itu. Akan lebih logis bila Australia berusaha meyakinkan negara-negara berkembang seperti Indonesia bahwa walaupun daya saing ekonomi mereka

semakin meningkat, mereka tidak akan dijadikan sasaran hambatan perdagangan (seperti penerapan kebijakan anti-dumping yang berlebihan.) Selanjutnya, dalam keadaan resesi ini Australia butuh kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara tetangga. Kelak kerjasama ini mungkin dapat tercapai melalui kerangka persetujuan APEC (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik).

Pilihan lain untuk memudahkan perdagangan ialah dengan penanaman modal langsung. Di muka telah dijelaskan bahwa impor Australia didominasi oleh produk-produk manufaktur, mencakup permesinan dan peralatan transportasi - yang belum menjadi produk-produk andalan Indonesia. Meskipun demikian, Australia dapat mendirikan bisnis di Indonesia agar dapat memanfaatkan rendahnya biaya tenaga kerja negeri ini. Penanaman modal langsung seperti ini di sektor industri manufaktur Indonesia akan tertolong oleh kecenderungan bisnis-bisnis Indonesia yang berusaha mengikuti prosedur standar yang ditetapkan Organisasi Standar Internasional (ISO) 9000.

Selain itu, ada lagi dua bidang yang membutuhkan diambilnya tindakan segera. Yang pertama adalah pengalihan dan penyebaran teknologi. Bidang ini berkaitan erat dengan masalah hak cipta intelektual.

Kedua adalah memperbaiki persepsi umum di Australia yang menganggap mudahnya barang-barang impor dari Indonesia

menasuki pasar Australia akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja di Australia. Persepsi ini dikobarkan terus oleh berita-berita menyesatkan yang disuguhkan media massa dan oleh proses politik dalam negeri Australia. Harus disadari, ditekankan kembali dan disebarluaskan bahwa pengurangan hambatan dan batasan perdagangan adalah demi keuntungan Australia sendiri, sebab ini akan memungkinkan konsumen Australia memetik keuntungan murah harga barang.

KESIMPULAN

Perdagangan kedua negara masih belum menadai. Perdagangan Indonesia-Australia berlangsung dalam konteks situasi perdagangan global yang lesu. Perekonomian Australia sendiri berada dalam keadaan tingginya tingkat pengangguran, yang meningkatkan tekanan politik dalam negeri agar proteksi ditingkatkan.

Porsi perdagangan Indonesia-Australian dapat dikatakan setengah penuh atau setengah kosong, tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Indonesia ingin memandang perdagangan kedua negara sebagai masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Potensi untuk itu ada, menunggu untuk digarap. Meskipun demikian, kedua pihak perlu bekerja keras untuk melaksanakannya.

Akses Indonesia ke pasar Australia dapat ditingkatkan dengan cara-cara berikut. Pertama, akan baik bagi Australia untuk

membuka pasarnya dengan cara mengurangi hambatan-hambatan tarif, menyebarluaskan informasi dan lebih terbuka terhadap berbagai macam standar yang berterima di negara-negara lain (misalnya standar tentang penganasan.) Persetujuan perdagangan preferensial kurang efektif untuk merangsang eksportir Indonesia memasuki pasar Australia.

Kedua, Australia harus menerima keunggulan komparatif negara-negara tetangganya dalam barang-barang tertentu, bukan menggunakannya sebagai alasan untuk memasang prosedur anti-dumping. Prosedur ini bila digunakan secara salah akan menjadi proteksi dalam bentuk lain.

Ketiga, perlu adanya hubungan politik yang stabil antara Indonesia dan Australia. Ketidakpastian politik berarti pula ketidakpastian bisnis, dan ini akhirnya akan mempengaruhi perdagangan. Upaya terus menerus untuk meningkatkan hubungan pemerintahan yang lebih baik dalam tahun 1990-an ini akan dapat mendukung upaya peningkatan hubungan dagang dan investasi yang lebih kuat.

REFERENSI

Biro Pusat Statistik, berbagai terbitan.

International Monetary Fund, *World Economic Outlook*, Washington D.C., 1993.

Krugman, Paul A., and Maurice Obstfeld, *International*

Economics, Scott, Foresman and Company: Glenview, Illinois, 1988.

Exporters Encyclopaedia, 1990.

Laporan Tahunan Bidang Perdagangan Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia, Canberra, Australia, 1990.

Pusat Promosi Perdagangan Indonesia, Laporan Tahunan, Pusat Promosi Perdagangan Indonesia, 1992.

Szirnai , 1993

BAB 2

AKSES PASAR INDONESIA DAN IKLIM REGULASI BAGI PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL DI MASA DEPAN: DARI PERSPEKTIF AUSTRALIA¹

George Fane

PENDAHULUAN

Tinjauan Umum

Bab ini membahas tentang akses pasar, tidak hanya terbatas mengenai hambatan-hambatan impor berupa tarif dan non-tarif melainkan juga mengenai perizinan investasi dan undang-undang yang mengatur perlindungan hak-hak milik intelektual. Ada empat tujuan yang hendak dicapai: pertama, untuk merangkum keputusan-keputusan dan undang-undang yang akhir-akhir ini membatasi akses perusahaan-perusahaan asing ke pasar Indonesia; kedua, melukiskan kemajuan yang dibuat dalam upaya memperlonggar pembatasan-pembatasan tersebut sejak tahun 1985; ketiga, memperbincangkan masalah-masalah khusus mengenai akses pasar yang dihadapi perusahaan-perusahaan Australia; dan keempat, membahas kemungkinan pengembangan di masa depan.

¹ Saya sangat berterima kasih atas saran-saran Ross McLeod, Chris Manning, Peter McCawley dan para anggota East Asia Analytical Unit, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.